



Judul : DPR Dorong Solusi Politik Permanen untuk Rohingnya
Tanggal : Kamis, 21 Desember 2017
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 4

DPR Dorong Solusi Politik Permanen untuk Rohingnya

DHAKA – DPR berkomitmen untuk terus konsisten dalam proses penyelesaian persoalan kemanusiaan di Rohingnya. Satu di antara upaya untuk memperjuangkan hak-hak kaum minoritas di Myanmar tersebut, DPR melakukan pertemuan dengan parlemen Bangladesh. Pengungsi Rohingnya saat ini banyak mendiami kamp-kamp pengungsian di Bangladesh guna mencari perlindungan setelah terusir oleh militer Myanmar. Sampai hari ini ada sekitar 1,1 juta orang yang mengungsi di Cox Bazar, Bangladesh.

Parlemen Indonesia yang dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR Fadli Zon melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury di Dhaka, Selasa (19/12). Turut mendampingi Duta Besar LBBP RI untuk Bangladesh, Rina P Soemarno, anggota delegasi Nurmansyah Efendi Tanjung (Fraksi PDIP), dan Ledia Hanifa Amaliah (Fraksi PKS). Kunjungan ini sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil pertemuan antara Duta Besar Bangladesh untuk Indonesia HE Mayor Jenderal Azmar.

Dalam pertemuan itu delegasi DPR menyampaikan niatnya untuk mengunjungi langsung lokasi pengungsian warga Rohingnya di daerah Cox Bazar

yang direncanakan Rabu (20/12) kemarin.

Dalam pertemuan dengan Ketua Parlemen Bangladesh, Fadli mendesak agar segera mencari solusi politik yang bersifat permanen, yaitu mengembalikan pengungsi Rohingnya ke tempat asalnya dan dijamin keamanannya. Tak hanya itu, mereka juga harus disiapkan infrastruktur yang memadai. “Kami mendorong agar ASEAN lebih tegas untuk menyikapi persoalan ini. ASEAN harus mengambil peran besar. Salah satu yang kami usulkan yaitu parlemen Bangladesh menulis surat pada parlemen-parlemen Asia Tenggara yang memberikan informasi terkait masalah pengungsi Rohingnya yang ada di Bangladesh,” kata Fadli melalui pernyataan tertulis kemarin.

Tidak hanya itu, DPR juga menyampaikan agar Bangladesh memberi kemudahan-kemudahan dalam pemberian visa untuk para pekerja yang menjadi relawan Rohingnya di perbatasan negara tersebut.

Pada hari yang sama Fadli bersama delegasi DPR juga melakukan pertemuan dengan State Minister Kementerian Luar Negeri Bangladesh Mr Mohammed Shahriar Alam. Selain membicarakan isu Rohingnya, pertemuan

juga dalam rangka untuk memperkuat hubungan bilateral dua negara yang memiliki hubungan baik sejak lama di bidang ekonomi dan budaya. “Selain bertemu dengan ketua parlemen dan menlu Bangladesh, kami juga akan mengunjungi lokasi pengungsian di Kutupalong, Cox Bazar, Rabu (20/12) untuk meninjau langsung kondisi para pengungsi,” ujar dia.

Menurut Fadli, pada 23 November 2017 sudah ada kesepakatan awal soal Repatriasi Bangladesh-Myanmar terkait kasus pengungsi Rohingnya di Dhaka. Hasil dari perjanjian tersebut adalah pemulangan lebih awal para pengungsi Rohingnya dari Bangladesh ke Myanmar. Namun, pelaksanaan hasil perundingan ini belum tentu terlaksana sesuai harapan. Myanmar belum menunjukkan sikap kooperatif dalam pelaksanaan repatriasi.

“Indonesia harus mendukung MoU Repatriasi dengan membuka komunikasi dengan Myanmar. Dalam MoU tersebut disampaikan akan ada proses repatriasi yang rencananya dimulai dua bulan ke depan dengan menjamin keamanan dalam proses pemulangan pengungsi. Itu harus terlaksana,” tandas wakil ketua umum Partai Gerindra ini.